Nurani: Jurnal Studi Agama dan Peradaban Spiritual
Volume: 1, Nomor: 4, (2026), Desember: 655 - 669
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Nurani/article/view/629
E-ISSN: 3124-9000

DINAMIKA PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI TURKI: DARI MASA TURKI USMANI HINGGA AWAL REPUBLIK TURKI

Nur Aini[1], Sukma Januarti[2], Idrus L.[3]
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *nnuraini2907@gmail.com[1*],sukmajanuarti6@gmail.com[2], idruslatif.iainbone@gmail.com[3]*

Info Artikel
Received: *10 Oktober 2026*
Revised : *21 Oktober 2026*
Accepted: *07 November 2026*
Published: *19 November 2026*

Keywords: *modernization, reform of Islamic education, Republic of Turkey, Tevhid-i Tedrisat, Ottoman Empire.*

Abstract
This study examines the dynamics of educational reform during the Ottoman Empire through the early years of the Turkish Republik. The study aims to understand the state of education during the Ottoman Empire, the process of educational reform during that period, and changes in Islamic education during the early years of the Turkish Republic. This study employs a qualitative method using a historical approach and literature review; data were obtained through an examination of various relevant sources on the history of Islamic education, education during the Ottoman Empire, and educational reform in Turkey. Analysis was conducted by synthesizing information from relevant sources to understand the process of educational reform in the Ottoman Empire. The results of the study indicate that education during the Ottoman Empire took place in institutions such as madrasahs, which were supported by the government and waqf institutions. At that time, the Ottoman Empire was still focused on military activities, while in the field of science, the empire did not stand out particularly. Educational reform during the Ottoman period was spearheaded by Sultan Mahmud II, who realized that the existing educational system needed to be developed in order to meet the needs of both the government and the people. Consequently, the government began establishing modern schools, primarily to train administrative and military personnel. Following the collapse of the Ottoman Empire and the establishment of the Republic of Turkey in 1923 under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk, the republican government sought to build a modern state by making secularism one of the most important principles of state life. Traditional religious institutions, including madrasahs, underwent major changes, and madrasahs operating under the old system were closed or dissolved as part of the reorganization of the education system.

Kata Kunci*:* modernisasi, pembaruan pendidikan Islam, Republik Turki, Tevhid-i Tedrisat, Turki Usmani.

Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai dinamika pembaruan pendidikan pada masa Turki Usmani hingga awal Republik Turki. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi pendidikan pada masa Turki Usmani, bagaimana proses pembaruan pendidikan pada masa Turki Usmani, serta perubahan pendidikan Islam pada masa awal Republik Turki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan studi kepustakaan, data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan dengan sejarah pendidikan Islam, pendidikan pada masa

Turki Usmani, dan pembarua pendidikan di Turki. Analisis dlakukan dengan menghubungkan berbagai informasi dari sumber yang relevan untuk memahami proses pembaruan pendidikan di Turki Usmani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Turki Usmani berlangsung di lembaga-lembaga seperti madrasah, yang didukung oleh pemerintah dan lembaga wakaf. Pada masa itu, Kesultanan Usmani masih berfokus pada kegiatan militer, sementara di bidang ilmu pengetahuan, Kesultanan tersebut tidak terlalu menonjol. Pembaruan Pendidikan pada masa Turki Usmani dipelopori oleh Sultan Mahmud II yang menyadari bahwa sistem pendidikan yang ada perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mulai mendirikan sekolah-sekolah modern, terutama untuk menyediakan tenaga administratif dan militer. Setelah runtuhnya Kesultanan Usmani dan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Pemerintah Republik berupaya membangun negara modern dengan menjadikan sekularisme sebagai salah satu prinsip terpenting dalam kehidupan negara. Lembaga-lembaga keagamaan tradisional, termasuk madrasah, mengalami perubahan besar, dan madrasah yang beroperasi berdasarkan sistem lama ditutup atau dibubarkan sebagai bagian dari reorganisasi sistem pendidikan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam sebenarnya telah tumbuh dan berkembang seiring dengan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan Islam memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda, yang sejalan dengan upaya pembaruan yang terus-menerus setelah generasi Nabi, sehingga dalam perkembangannya selanjutnya, pendidikan Islam terus mengalami perubahan baik dalam hal kurikulum (mata pelajaran) maupun terkait lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Artinya, pada kenyataannya upaya perubahan memang ada, meskipun dalam skala kecil. Ini merupakan proses yang wajar dalam pendidikan Islam (Wardhani, 2022).

Pendidikan merupakan bidang kelembagaan yang mendasar, yang tidak hanya mencerminkan basis pengetahuan masyarakat, tetapi juga sistem nilai, organisasi politik, kapasitas ekonomi, dan visi peradaban. Dalam konteks ini, praktik dan lembaga pendidikan yang telah dibangun oleh bangsa Turki di berbagai wilayah geografis sejak kemunculannya pertama kali di panggung sejarah, harus dinilai tidak hanya sebagai pengalaman pedagogis, tetapi juga sebagai ekspresi keinginan untuk membangun negara, memastikan kelangsungan budaya, dan mendorong reformasi pendidikan (Gündüz et al., 2026). Pendidikan Islam merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan peradaban Islam, baik dalam penyebaran ilmu pengetahuan maupun dalam pembentukan nila-nilai

keagamaan masyarakat. Dalam sejarah Turki, pendidikan Islam mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan politik, sosial, dan kebudayaan.

Kesultanan Usmani terbentuk pada masa ketika Islam mengalami kemunduran pertamanya. Awalnya, Kesultanan ini sangat kecil, namun berkembang dan menjadi kekuatan besar pada masanya, dengan wilayah kekuasaan yang mencakup Afrika Utara, Asia Barat, dan Eropa Timur. Masa pemerintahannya cukup panjang dari tahun 1299 hingga 1924, yaitu sekitar enam abad (600 tahun). Kesultanan Usmani melakukan berbagai langkah, terutama untuk memperluas zona pengaruh Islam ke benua Eropa. Ekspansi Kesultanan Usmani dimulai di Eropa Timur dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Namun, dalam bidang peradaban dan budaya (kecuali aspek fisik), perkembangannya jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan peradaban politik. Akibatnya, tidak hanya negara-negara yang ditaklukkan pada akhirnya terbebas dari kekuasaan pusat, tetapi juga di antara penduduknya tidak banyak lagi yang menganut agama Islam (Kusuma & Ayundasari, 2021)**.**

Kesultanan Usmani sangat gencar memperluas kekuasaannya, sehingga pada masa pemerintahan Orham, sebagian wilayah Eropa telah berada di bawah kekuasaannya. Kesultanan ini mencapai masa kejayaannya pada awal abad ke-16, ketika Selim mengalahkan Kesultanan Safawi dan memperluas wilayahnya ke selatan hingga ke Mesir dan Hijaz. Pada awal abad ke-18, Turki Usmani berusaha memulihkan kejayaannya dengan melakukan reformasi yang sangat aktif. Bahkan Sultan Selim I III membuka beberapa kedutaan besar Usmani di Eropa. Kemudian, Mahmud II memperkenalkan berbagai lembaga reformasi yang sebagian besar diadopsi dari Barat, termasuk di bidang pendidikan, militer, ekonomi, dan peradilan. Periode ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai periode "reorganisasi". Orang Turki melakukan berbagai upaya reformasi, yang melibatkan para ulama, kaum muda, ilmuwan, maupun birokrat, hingga abad ke-20 (Idrus & Sadali, 2020). Kerajaan Usmani yang menjadi simbol Islam akhirnya hilanh dari peredaran dunia dengan dihapusnya gelar khalifah tersebut. Dibawah kekuasaan mustafa lah, pengaruh kekuasaan sultan berakhir si tahun 1922, dan setelah itu, khalifah sebagai institusi agamapun dihapus. Dengan demikian, berakhirlah kehidupan panjang dan seluruh kebesaran pemerintahan baru.

Penelitian mengenai pembaruan pendidikan Islam di Kesultanan Turki Usmani pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II, telah dilakukan oleh sejumlah penelitian yang membahas mengenai evolusi pendidikan Islam pada masa kesultanan Usmani serta model pendidikan pada masa kesultanan Usmani. Kajian sebelumnya umumnya memperlakukan pembaruan pendidikan di Turki secara terpisah: memusatkan perhatian murni pada masa Kesultanan Usmani era Sultan Mahmud II (Idrus & Sadali, 2020; Kusuma & Ayundasari, 2021) atau sebatas menelaah sekularisasi awal

Republik (Hanifa et al., 2026; Thoriquttyas, 2024). Kesenjangan tersebut mengabaikan analisis komparatif mengenai kesinambungan dan pergeseran epistemik dari model reformasi dualistik Usmani menuju unifikasi sekuler radikal Kemalis. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengkaji lebih luas bagaiman proses pembaruan pendidikan Islam di Turki mulai dari masa Turki Usmani hingga era awal Republik Turki. Kajian terhadap pembaruan pendidikan Islam di Turki penting dilakukan memahami dinamika pembaharuan pendidikan Islam di Turki yang berlangsung dari masa kesultana Turki Usmani hingga awal Republik, karena perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, budaya, dan ideologi yang berkembang pada setiap periode. Oleh karena itu, Melalui penelitian ini kita akan membahas mengenai kondisi pendidikan Islam pada masa Turki Usmani, proses pembaharuan pendidikan Turki Usmani, perubahan pendidikan Islam pada awal Republik Turki serta dampak pembaharuan pendidikan Islam di Turki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pedekatan studi kepustakaan (*library research).* Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian ilmiah yang menjadikan literatur sebagai sumber utama data dan dasar analisis. Literatur dalam konteks ini tidak hanya berarti buku, tetapi mencakup artikel jurnal, disertasi, tesis, prosiding, laporan penelitian, dokumen kebijakan, arsip, kitab, regulasi, naskah klasik, dan sumber digital akademik yang relevan (Haramain, 2023)**.** Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada pengkajian dan pemahaman terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pembaruan pendidikan Islam di Turki. Data penelitian yang digunakan dari buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber kepustakaan lain yang relevan.

Pengumpulan dan analisis data mengikuti empat tahapan dalam metode sejarah. Tahapan pertama adalah heuristik, yaitu menghimpun artikel jurnal mutakhir dan buku sejarah pendidikan islam melalui Google Scholar, Portal Garuda, Portal Sinta, dan TR Dizin dengan kata kunci "pembaruan pendidikan islam", "Turki Usmani", *"Tevhid-i Tedrisat*", dan "*Ataturk secularization*". Tahap kedua adalah kritik sumber, yakni memverifikasi otentisitas data teks dan menyaring bias historiografi baik yang bernuangsa sekuler maupun apologetis. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu menganalisis keterkaitan kausalitas antara krisis militer Kesultanan, adopsi kurikulum Barat, dan pembubaran sistem madrasah. Tahap terakhir adalah historiografi, yakni menyajikan sintesis narasi sejarah secara tematis dan kronologis. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada sumber sekunder dan tidak menelaah manuskrip atau kronik primer. Oleh sebab itu, hasilnya

dimaksudkan sebagai sintesis konsetual dan bukan sebagai rekonstruksi sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam Pada Masa Turki Usmani

Setelah Mesir berada di bawah kekuasaan Kesultanan Usmani, Sultan Selim I memerintahkan agar buku-buku dan barang-barang berharga dari perpustakaan Mesir dipindahkan ke Istanbul. Dengan demikian, sultan Turki memiliki dua kekuasaan: yang pertama mengurus urusan duniawi atau pemerintahan negara, yang dilambangkan dengan gelar sultan, dan yang kedua mengurus urusan keagamaan, yang dilambangkan dengan gelar khalifah (Nata, 2016)**.**

Setelah Sultan Selim I, yang merupakan pelopor dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan wafat, ia digantikan oleh Sultan Suleiman al-Kanuni, justru pada masa pemerintahan Sultan Suleiman inilah Kesultanan Usmani mencapai masa keemasan dan kejayaan terbesar dalam sejarahnya (Pulungan, 2019)**.** Sultan Sulaiman I melanjutkan ekspansi baik di benua Eropa maupun di Asia dan Afrika Utara, hingga Turki Usmani dapat dianggap sebagai negara adidaya, karena memiliki pemerintahan dan wilayah yang cukup luas. Eropa pada masa itu dapat dianggap relatif lemah, sedangkan negara-negara Islam lainnya, yaitu Kesultanan Safawi di Persia dan Kesultanan Mughal di India, tidak sebesar dan sekuat Kesultanan Usmani. Perkembangan dan kejayaan Kesultanan Usmani mencakup berbagai bidang; antara lain, wilayahnya cukup luas dan menjangkau Eropa, Afrika, dan Asia. Luas wilayah ini diperkuat oleh perkembangan di bidang militer, yaitu pembentukan pasukan Janissary dan Tawiyya, serta pembentukan armada laut yang kuat (Kusuma & Ayundasari, 2021).

Pada masa Kesultanan Usmani, pendidikan dan pembelajaran mengalami kemunduran, terutama di wilayah-wilayah seperti Mesir, Baghdad, dan sebagainya. Diketahui bahwa lembaga pendidikan pertama Kesultanan Usmani didirikan sejak abad ke-14 dan seterusnya, ketika Kesultanan tersebut masih berupa kerajaan kecil. Madrasah Orham adalah madrasah pertama di Kerajaan Usmani. Madrasah Iznik, yang juga dikenal sebagai "*Orhaniye Iznik*", didirikan oleh Gazi pada tahun 1331. Madrasah "*Darül Hadis*", yang mulai beroperasi pada masa pemerintahan Murad II, mempertahankan statusnya sebagai madrasah tingkat tertinggi hingga masa pemerintahan Sultan Mehmed Fatih (Koç, 2017)**.** Metode pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan di Turki Usmani adalah menghafal teks, meskipun para siswa tidak memahami maknanya. Para siswa, setelah menghafal teks-teks tersebut, barulah mulai mempelajari komentar-komentarnya. Oleh karena itu, pembelajaran menjadi semakin berat dan semakin sulit untuk dihafal (Pulungan, 2019).

Sebagai bangsa dengan tradisi militer, Turki Usmani terutama memusatkan aktivitasnya di bidang militer, sementara di bidang ilmu pengetahuan, negara ini tidak terlalu menonjol. Oleh karena itu, dalam warisan intelektual Islam tidak ditemukan ilmuwan-ilmuwan terkemuka dari Turki Usmani (Nata, 2016). Pendidikan, sebagai dimensi dinamis dalam perkembangan bangsa pada masa Kesultanan Usmani, tidak cukup menarik untuk dianalisis kondisinya. Pasalnya, di balik masa kejayaan ekspansi tersebut tersembunyi kemunduran intelektual yang parah. Pada periode terakhir Kesultanan Usmani, Kesultanan tersebut berada di persimpangan jalan, pada saat Eropa sedang mengalami Era Pencerahan dan Renaisans dengan segala dimensinya, yang memengaruhi seluruh dunia. Hal inilah yang mendorong Sultan Mahmud II untuk memulai reformasi di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan.

Pendidikan Islam pada masa kesultanan Usmani berkembang pesat melaui madrasah, seiring berjalannya waktu, madrasah tidak hanya menjadi pusat studi ilmu-ilmu agama, tetapi juga bagian penting dari organisasi politik yang menjadi landasan Kesultanan Usmani. Namun, perkembangan pembelajaran selama periode ini tidak dapat dipandang sebagai fenomena yang seragam. Tradisi keagamaan Islam terus berkembang, namun tuntutan pemeritahan yang semakin berat juga mengarahkan fokus yang lebih besar pada yurisprudensi praktis, terutama dalam hal hukum militer dan administrasi. Dengan demikian, perkembangan pendidikan Islam selama periode kesultanan Usmani mencerminkan interaksi antara tradisi keilmuan yang mapan dan kebutuhan akan reformasi yang muncul di tengan perubahan zaman.

Pembaruan Pendidikan Islam Pada Masa Turki

Pada awal abad ke-19, Kesultanan Usmani sedang mengalami kemunduran dan perpecahan. Sebenarnya, Kesultanan Usmani mengalami stagnasi di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan militer Usmani tidak sejalan dengan perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan; ketika Eropa mencapai keunggulan teknis dalam persenjataan, Usmani terus-menerus mengalami kekalahan dalam pertempuran. Konflik internal di dalam Kesultanan Usmani semakin memanas, baik dari luar dalam bentuk tantangan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan mantan saingannya, Eropa maupun di dalam negeri, berupa pemberontakan di berbagai tempat yang mencari pembebasan dari kekuasaan Usmani, disertai dengan kemerosotan moral para penguasa dan kemunduran ekonomi bangsa (Pulungan, 2019)**.**

Penurunan nilai ilmu Islam ini, pada kenyataannya, sebagian besar berasal dari perkembangan internal Islam sendiri, yang tidak lagi memandang akal budi yang agung sebagai komponen penting

dalam studi yang perlu diperhatikan. Akibatnya, pada periode berikutnya, pengetahuan ini diperoleh dan dimanfaatkan dalam skala yang jauh lebih besar oleh orang-orang Eropa, yang sebelumnya sama sekali tidak menyadarinya. Pemanfaatan strategis pengetahuan tersebut membuat orang-orang Eropa sering kali memenangkan pertempuran melawan komunitas Muslim. Memang, banyak negara Islam berada di bawah kekuasaan Eropa. Inilah awal dari periode ketika umat Islam benar-benar menyadari betapa jauh mereka telah tertinggal (Wardhani, 2022)**.**

Mahmud II (sultan ke-33) dianggap sebagai penggagas reformasi Kesultanan Usmani. Berbagai tantangan yang disebutkan di atas mendorong munculnya gagasan-gagasan reformis sang sultan, dengan tujuan untuk mempertahankan Kesultanan Usmani. Ia mulai melepaskan diri dari tradisi monarki otokratis untuk menjalin hubungan dengan rakyatnya (Nata, 2016). Di antara reformasi yang diprakarsai oleh Sultan Mahmud II adalah reformasi yang berkaitan dengan militer, administrasi, dan perundang-undangan; namun, faktor yang paling signifikan dan berpengaruh bagi perkembangan reformasi di Kesultanan Usmani adalah reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan yang ingin ia terapkan merupakan upaya untuk memodernisasi sistem madrasah, yang pada saat itu hanya mengajarkan ilmu agama, dengan memasukkan pengetahuan sekuler. Namun, terbukti sangat sulit bagi Mahmud II untuk menerapkan reformasi kurikulum madrasah dengan memasukkan pengetahuan sekuler. Pada akhirnya, madrasah-madrasah tradisional diizinkan untuk terus beroperasi, dengan para ulama tetap memegang kendali. Namun, di samping itu, ia mendirikan dua sekolah negeri: *Makteb-i Ma'rif* (Sekolah Pengetahuan Umum) dan *Makteb-i Ulum-u Adebiye* (Sekolah Sastra dan Seni). Siswa untuk kedua sekolah ini dipilih dari madrasah-madrasah tingkat atas (Idrus & Sadali, 2020) . Selanjutnya, Sultan Mahmud II juga mendirikan sekolah-sekolah bergaya Eropa, seperti sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah bedah. Selain itu, ia mengirimkan hampir 150 siswa ke luar negeri dengan harapan mereka akan membawa pulang gagasan-gagasan baru. Pada tahun 1827, Sultan Mahmud II mendirikan sebuah sekolah kedokteran di Istanbul dengan tujuan melatih dokter-dokter militer baru. Gagasan-gagasan reformis ini menunjukkan komitmen tulus Sultan Mahmud II terhadap pengembangan komunitas Muslim Turki, dan ia meyakini bahwa upaya reformasi tidak akan membuahkan hasil kecuali jika fondasi dasarnya yaitu, cara berpikir diubah.

Selanjutnya, gerakan reformasi yang sedang berlangsung itu dikenal sebagai Tanzimat, yang berasal dari kata ‘nizam’, yang berarti mereformasi, membangun, dan mengembangkan. Pada periode inilah berbagai undang-undang dan peraturan baru diperkenalkan, dan banyak pejabat yang menempuh pendidikan di Eropa serta memahami praktik-praktik administrasi modern. Tanzimat adalah gerakan reformasi di Turki yang diterapkan dalam birokrasi dan administrasi Kesultanan

Usmani selama masa pemerintahan Sultan Abdul Majid (1839–1861), putra Sultan Mahmud II, dan Sultan Abdul Aziz (1861–1876).

Sebelum masa Tanzimat, urusan pendidikan di Kesultanan Usmani bukanlah tanggung jawab negara, melainkan tanggung jawab komunitas-komunitas keagamaan *(millets)*. Pendidikan bagi umat Islam berada di bawah wewenang para ulama dan terutama berfokus pada pengajaran agama. Upaya untuk menempatkan tanggung jawab pendidikan di bawah kewenangan negara baru dimulai ketika dekrit-dekrit Tanzimat diproklamasikan. Pada tahun 1773, sebuah sekolah angkatan laut didirikan, diikuti oleh sekolah militer (1793), sekolah teknik dan kedokteran (1827), serta sekolah ilmu militer (1834). Semua sekolah ini ditujukan untuk mendidik kalangan elit militer. Sekolah-sekolah serupa untuk mendidik diplomat dan pegawai negeri sipil juga didirikan, seperti Biro Reformasi (1833) dan Sekolah Administrasi Publik, yang kemudian menjadi Fakultas Ilmu Politik di Universitas Ankara pada tahun 1950. Sebuah rencana pendidikan besar diluncurkan pada tahun 1846. Rencana ini membuka jalan bagi sistem pendidikan yang komprehensif, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, di bawah administrasi Kementerian Pendidikan *(wezaret-i ma'arf-i 'umumiye*). Pada tahun 1869, pemerintah pusat bahkan memperkenalkan skema untuk memberikan dukungan keuangan penuh bagi pendidikan dasar. Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri sangat terbantu oleh teladan yang diberikan oleh perkembangan sekolah-sekolah non-Kristen (Pulungan, 2019).

Reformasi pendidikan pada masa kesultanan Usmani menandai perubahan dalam pendekatan terhadap sistem pendidikan. Meskipum Islam sebelumnya berfokus pada madrasah-madrasah dengan kurikulum Islam tradisional, meningkatkan kebutuhan di sektor medis, militer, dan pelayanan administrasi mendorong munculna sekolah-sekolah baru yang lebih modern. Kebijakan Sultan Mahmud II untuk membuka sekolah-sekolah khusus merupakan bagian penting dari transformasi ini. Selain itu, selama periode tanzimat, intervensi negara dalam bentuk pemaruan pendidikan menjadi jauh lebih signifikan, perubahan ini menandakan bahwa pendidikan mulai dipandang sebagai sarana untuk memperkuat negara serta beradaprasi dengan kemajuan ilmiah dan tantangan yang ditimbulkan oleh eropa.

Perubahan Pendidikan Islam Pada Awal Republik Turki

Setelah berakhirnya Kesultanan Usmani pasca Perang Dunia I, bangsa Turki memasuki perjuangan sengit untuk membangun negara-bangsa baru yang mirip dengan negara-negara di Kesultanan lain, dengan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 setelah empat tahun perlawanan

dan konflik (Gündüz et al., 2026). Di bawah kepemimpinn Mustafa Kemal Ataturk, pendidikan ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan modernisasi negara dan membentuk indentitas nasional baru.

Gagasan Mustafa Kemal Atatürk mengenai modernisasi pendidikan sangat penting bagi transformasi Turki menjadi negara modern pada awal abad ke-20. Reformasi ini tidak hanya berkaitan dengan politik dan administrasi, tetapi juga mencakup modernisasi sistem pendidikan, yang di bawah Kesultanan Usmani telah sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga keagamaan. Pemisahan antara pendidikan keagamaan dan sekuler dianggap menghambat perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran rasional, dan kemajuan teknis di Turki; oleh karena itu, sistem pendidikan baru yang modern dan sekuler dianggap perlu (Hanifa et al., 2026)**.** Menurut Mustafa Kemal, sekularisme tidak hanya memisahkan urusan pemerintahan dari pengaruh agama, tetapi juga membatasi peran agam dalam kehidupan bangsa Turki, karena menurutnya indikator kemajuan peradaban dilihat secara keseluruhan bukan secara terpisah. Peradaban Barat mampu mengungguli peradaban-peradaban lain bukan hanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan berkat seluruh unsurnya secara keseluruhan. Dan justru sekularisasi-lah yang melahirkan peradaban maju ini. Oleh karena itu, Mustafa Kemal berpendapat bahwa jika bangsa Turki menginginkan peradaban yang maju, maka mereka harus melakukan sekularisasi (Harahap, 2019).

Salah satu kebijakan penting dalam pembaruan adalah diberlakukannya *Tevhid-i Tedrisat Kanunu* atau undang-undang penyatuan pendidikan pada 3 maret 1924. Alasan utama di balik pembentukan *Tevhid-i Tedrisat* (persatuan pendidikan) adalah kebutuhan akan pendekatan pendidikan yang seragam dan terintegrasi guna mendorong terbentuknya identitas nasional yang kokoh. Dengan menyerukan penerapan "sistem pendidikan yang terpadu", kesatuan pendidikan dianggap sangat penting untuk membentuk warga negara yang bersatu, yang sangat dibutuhkan pada masa-masa awal Republik untuk memperkuat identitas nasional setelah runtuhnya Kesultanan Usmani. Bagi Republik Turki yang baru saja didirikan, yang bertujuan untuk membangun negara bangsa yang sekuler dan modern, mempertahankan sistem pendidikan yang terpadu sangatlah penting untuk mencegah terpecahnya masyarakat serta mendorong pemahaman yang sama mengenai nilai-nilai kebangsaan dan loyalitas. Kemudian Mustafa Kemal memerintahkan agar bahasa Turki dipakai pada mimbar-mimbar masjid, khutbah Jumat, pada azan untuk shalat dan al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Turki (Yuniarti et al., 2023).

Kebijakan penyatuan secara efektif mengurangi pengaruh lembaga-lembaga keagamaan dalam bidang pendidikan, yang mengakibatkan penutupan banyak sekolah keagamaan. Akibatnya,

pendidikan keagamaan dibatasi hanya pada sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi tertentu, serta diatur lebih ketat dalam kerangka kurikulum sekuler. Seiring dengan penghapusan madrasah tradisional sebagai jalur pendidikan, persiapan guru agama pun terganggu. Pemerintah telah menerapkan pendekatan sekuler baru dalam pelatihan guru, sehingga guru agama harus menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan yang terus berubah dan didominasi oleh norma-norma sekuler. Tujuannya adalah untuk menggabungkan semua lembaga pendidikan ke dalam satu sistem yang dikendalikan oleh negara dan diatur oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Thoriquttyas, 2024).

Pada masa-masa awal Republik Turki, disahkan Undang-Undang *Tevhid-i Tedrisat* yang mencerminkan sikap ideologis kepemimpinan Republik, di mana pendidikan sekuler dianggap sebagai faktor penting dalam pembentukan masyarakat modern dan progresif. Pemisahan urusan agama dan negara dianggap penting untuk memastikan perkembangan negara tanpa campur tangan lembaga-lembaga keagamaan. Elit Republik membayangkan sebuah Turki yang modern, di mana pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk warga negara yang sekuler dan berpikiran ilmiah, yang setia kepada negara baru tersebut, bukan kepada otoritas keagamaan. Pasal ini menetapkan bahwa semua sekolah dan lembaga keagamaan, yang sebelumnya dikelola oleh *Şerriye ve Evkaf Vekaleti* (Kementerian Syariah dan Wakaf) atau yayasan keagamaan swasta, harus diserahkan ke bawah pengawasan lembaga pemerintah pusat *Milli Egitim Bakanlig*. Kebijakan ini pada dasarnya menyatukan sistem pendidikan ke dalam satu struktur administrasi sekuler, dengan menyesuaikan tujuan dan kurikulum guru-guru agama agar selaras dengan nilai-nilai sekuler dan nasionalis Republik. Karena semua sekolah agama kini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Turki (*Milli Eğitim Bakanlığı*), negara telah memperoleh kendali penuh atas pendidikan agama serta kurikulumnya, kualifikasi guru, dan metode pedagogisnya.

Titik balik penting kedua dalam reformasi pendidikan adalah tekad untuk memberantas buta huruf. Setelah penerapan alfabet baru, menteri pendidikan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan kursus membaca dan menulis bagi orang-orang berusia 16–30 tahun. Bekerja sama dengan salah satu menteri terpercaya, Atatürk menginspirasi masyarakat melalui teladannya dan keterlibatannya yang aktif, dan pada tahun 1928, hampir 1,5 juta sertifikat kemampuan membaca dikeluarkan di negara yang saat itu berpenduduk sekitar 10 juta jiwa. Atatürk menjadi Direktur Sekolah Rakyat. Orang-orang belajar membaca dan menulis, berhitung, serta memperoleh pengetahuan tentang kesehatan. Atas perintah Atatürk, para guru memberikan buku Konstitusi kepada mereka yang telah bisa membaca dan menulis (Akgul, 2019).

Peralihan dari alfabet Arab ke alfabet Latin menjadi salah satu bentuk pembaharuan yang dilakukan Atatürk, ini tidak hanya memengaruhi aspek teknis bahasa, tetapi juga orientasi budaya dan epistemologi masyarakat. Kebijakan ini dapat dianggap sebagai strategi yang bertujuan untuk mengintegrasikan masyarakat Turki ke dalam sistem pengetahuan Barat yang lebih luas. Dalam konteks perubahan sosial, perubahan ini mempercepat proses pembelajaran membaca, sekaligus memastikan akses ke ilmu pengetahuan modern. Dari sudut pandang sosiopolitik, pembatasan pendidikan agama formal menunjukkan adanya transformasi hubungan antara negara dan agama di ruang publik. Dengan demikian, pendidikan menjadi arena perundingan antara nilai-nilai sekuler yang dipromosikan oleh negara dan nilai-nilai keagamaan yang masih hidup di masyarakat. Dari perspektif konflik sosial, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah ruang yang netral, melainkan arena pertarungan ideologis. Oleh karena itu, reformasi pendidikan membawa implikasi sosial yang kompleks dan berkelanjutan.

Perbandingan ketiga fase tersebut, yaitu pendidikan pada masa usmani tradisional, pembaruan pendidikan pada masa turki usmani, dan pada masa awal Republik, dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. *Matriks komparatif transformasi sistem pendidikan Islam di Turki*

Dimensi Analisis	Era Usmani Tradisional (Abad 14-18 M)	Era Pembaruan (Abad 19 M)	Era Awal Republik Turki (1923-1938 M)
Landasan ideologi	Teosentris dan berorientasi imperium; syariat Islam dan tradisi keagamaan mazhab Hanafi.	Pragmatisme modernisasi militer dan birokrasi (*Nizam-i Cedid*).	Sekularisme radikal (*Laiklik*), nasionalisme Turki, dan saintisme positivistik.
Lembaga utama	Madrasah (misalnya Iznik dan *Darül Hadis*), kuttab, dan majelis tarekat.	Dualisme: madrasah tradisional berdampingan dengan sekolah negeri modern (*Mekteb*).	Unifikasi sekolah nasional di bawah kendali *Milli Eğitim Bakanlığı*.
Kurikulum dan bahasa	*Ulum al-din* (fikih, tafsir, hadis), gramatika Arab dan Persia; metode hafalan	Ilmu sains modern, kedokteran, teknik militer, geografi, dan bahasa Prancis.	Sains rasional murni dan sejarah nasionalis Turki; penggunaan alfabet Latin (1928).

Dimensi Analisis	Era Usmani Tradisional (Abad 14-18 M)	Era Pembaruan (Abad 19 M)	Era Awal Republik Turki (1923-1938 M)
	matan teks.		
Status pendidikan agama	Menjadi inti dan poros seluruh jenjang pendidikan tinggi.	Terisolasi di madrasah lama; tidak diajarkan secara integratif di sekolah kedokteran dan militer.	Madrasah dibubarkan melalui *Tevhid-i Tedrisat* (1924); pelajaran agama dibatasi dan pada periode tertentu dihapuskan dari kurikulum.
Aparatur pengelola	Ulama (*Şeyhülislam*) dan yayasan pengelola wakaf (*Evkaf*).	Kementerian Pendidikan (*Nezaret-i Maarif-i Umumiye*) dan militer kesultanan.	Kementerian Pendidikan Nasional Republik Turki yang sepenuhnya sekuler.

Dampak modernisasi pendidikan terhadap sistem pendidikan dan masyarakat Turki. Modernisasi pendidikan telah membawa perubahan signifikan dalam orientasi sistem pendidikan, yang kini semakin berfokus pada ilmu pengetahuan dan keterampilan rasional (Hanifa et al., 2026). Pengaruh sekularisme pada masa republik menyebabkan perubahan dalam pengajaran agama, dan pada periode-periode tertentu, mata pelajaran tersebut bahkan dihapuskan dari kurikulum sekolah. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebijakan negara, dengan lebih menekankan pada pengetahuan tentang agama. Perubahan ini juga memicu perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara dalam bidang pendidikan. Namun, kurikulum pendidikan agama terus disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan keragaman masyarakat. Dengan demikian, pembaharuan Pendidikan di Turki berdampak pada modernisasi sistem pendidikan, perubahan kurikulum agama, serta munculnya diskusi mengenai peran agama dalam pendidikan nasional (Zengin, 2017).

Penutupan madrasah dan pemaksaan unifikasi sekuler melalui UU *Tevhid-i Tedrisat* (1924) sempat menciptakan kekosongan kader ulama, imam, dan khatib di Turki. Namun, kebijakan sekularisasi represif ini dalam jangka panjang justru memicu resistensi kultural masyarakat Anatolia yang religius, sehingga pada dekade 1950-an negara terpaksa mengizinkan pembukaan kembali

sekolah kejuruan keagamaan (Imam Hatip). Dari rahim sekolah Imam Hatip inilah kelak lahir kelas menengah Muslim terdidik dan elite politik baru yang menjadi basis kebangkitan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang mengambil alih di era kontemporer (Barkatillah, 2023). Pendidikan agama tidak hanya memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga mendorong pembentukan moral dan identitas nasional masyarakat Turki. Namun, pelaksanaannya masih berada di bawah pengawasan negara. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Turki sangat dipengaruhi oleh dinamika politik serta hubungan antara agama dan negara (Kalkan, 2026). Dengan demikian, kebangkitan pendidikan Islam pada periode ini merupakan hasil dari proses di mana terjadi penyelarasan antara pembentukan nilai-nilai agama, kepentingan politik, dan identitas nasional.

SIMPULAN

Pada masa Kesultanan Utsmani, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memainkan peran penting dalam pelestarian serta penyebaran ajaran Islam. Pada periode ini, pendidikan terutama berlangsung di lembaga-lembaga seperti madrasah, yang didukung oleh pemerintah dan lembaga wakaf. Pada masa itu, Kesultanan Utsmani masih berfokus pada kegiatan militer, sementara di bidang ilmu pengetahuan, Kesultanan tersebut tidak terlalu menonjol. Di balik masa kejayaan ekspansi Kesultanan Utsmani, tersembunyi kemunduran intelektual yang parah. Hal itulah yang mendorong Sultan Mahmud II untuk memulai reformasi di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan.

Setelah mengalami kemunduran dan perpecahan pada abad ke-19, Kesultanan Utsmani mengalami stagnasi di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penurunan peran ilmu pengetahuan Islam ini sebenarnya sebagian besar berasal dari perkembangan internal Islam itu sendiri, di mana akal budi yang tinggi tidak lagi dianggap sebagai bagian penting dari studi yang perlu diperhatikan. Sultan Mahmud II menyadari bahwa sistem pendidikan yang ada perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mulai mendirikan sekolah-sekolah modern, terutama untuk menyediakan tenaga administratif dan militer. Di bidang pendidikan, perkembangan ini mendorong munculnya sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum yang lebih modern.

Perubahan besar terjadi setelah runtuhnya Kesultanan Utsmani dan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Pemerintah Republik berupaya membangun negara modern dengan menjadikan sekularisme sebagai salah satu prinsip terpenting dalam kehidupan negara. Pada tahun 1924, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Kesatuan

Pendidikan atau *Tevhid-i Tedrisat kanunu.* Sesuai dengan kebijakan ini, lembaga pendidikan berada di bawah pengawasan negara yang terpusat. Lembaga-lembaga keagamaan tradisional, termasuk madrasah, mengalami perubahan besar, dan madrasah yang beroperasi berdasarkan sistem lama ditutup atau dibubarkan sebagai bagian dari reorganisasi sistem pendidikan. Tujuan reformasi ini adalah untuk membangun sistem pendidikan nasional terpusat yang sejalan dengan arah modernisasi Republik Turki. Namun, kebijakan ini juga berdampak pada bidang pendidikan Islam. Pendidikan agama tidak lagi memiliki peran yang sama seperti pada masa Kesultanan Utsmani. Hal ini memicu perubahan dalam hubungan antara agama, negara, dan pendidikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada kajian literatur sekunder tanpa mengakses arsip primer dokumen Utsmani (*Osmanlı Arşivi*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah secara mendalam dinamika kurikulum sekolah *Imam Hatip* pada era transisi demokrasi 1950-an, atau membandingkan secara komparatif model pembaruan pendidikan Turki Kemalis dengan modernisasi madrasah di Indonesia pada kurun waktu yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Akgul, A. (2019). *The case of Atatürk Reforms in early Turkish Republic between 1923-1946: From an educational perspective* [Harvard University DASH Repository]. http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:42004235

Barkatillah. (2023). Pendidikan Islam di negara Turki. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 102–107. https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.195

Gündüz, M., Öztürk, K., Yildirim, K., Özkan, S. H., Hızlı, K., Karabekmez, M., & Demirel, F. (2026). The journey of Turkish education: A historical and comparative analysis. In M. Gündüz & K. Öztürk (Eds.), *Maarif Global Education Series*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-92-1557-7

Hanifa, A. D., Rahma, A. L., & Mafazah, L. D. (2026). Pemikiran Mustafa Kemal Ataturk dalam modernisasi pendidikan Turki. *EDUCATOR : Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan*, *6*(2), 91–104. https://doi.org/10.51878/educator.v6i2.11006

Harahap, H. S. (2019). Pembaharuan Pendidikan Islam di Turki. *Jurnal Hibrul'ulama*, *1*(1), 18–33.

Haramain, M. (2023). *Metodologi penelitian kepustakaan (literature review)* (Syaifullah, Ed.; 1st ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.

Idrus, L., & Sadali. (2020). *Sejarah pendidikan Islam (dari semenanjung Arabiyah hingga melintas benua)* (1st ed.). CV. Mario Sulfana.

Kalkan, O. (2026). The politics of religious education in Turkey, 1940s–1971: modern conservative consensus in reformulation and regulation. *New Perspectives on Turkey*, 1–21.

https://doi.org/10.1017/npt.2026.10093

Koç, E. M. (2017). *Ahmet Cevdet Paşa ve Osmanlı devleti'nde eğitimin modernleşmesi* (M. M. İlhan, Ed.) [İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi]. https://hdl.handle.net/20.500.12436/453

Kusuma, V. L. P., & Ayundasari, L. (2021). Pembaharuan pendidikan Islam di Turki Usmani pada masa pemerintahan Sultan Mahmud tahun 1784-1839 M. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(1), 54–60. https://doi.org/10.17977/um063v1i1p54-60

Nata, A. (2016). *Sejarah pendidikan Islam (pada periode klasik dan pertengahan)* (5th ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Pulungan, J. S. (2019). *Sejarah pendidikan Islam* (1st ed.). PRENADAMEDIA GROUP.

Thoriquttyas, T. (2024). Tevhid-I Tedrisat and the policy of Islamic teacher's development in Türkiye (1924-1948). *Journal of Religious Policy*, *3*(2), 218–242. https://doi.org/10.31330/repo.v3i2.92

Wardhani, N. (2022). Pola pembaharuan pendidikan Islam di Turki. *JURNAL AZKIA : Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, *15*(1), 70-87TY-THES AU-Akgul, Ahmet PY-2019 TI-Th. https://doi.org/10.58645/jurnalazkia.v15i1.198

Yuniarti, D., Syukur, S., & Susmihara, S. (2023). Lahirnya negara Islam sekuler Turki dan ide pembaharuan Mustafa Kemal. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, *9*(1), 11–21. https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.1599

Zengin, M. (2017). Türkiye'de cumhuriyet dönemi eğitim politikalarının din dersi öğretim programlarına etkileri. *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, *19*(36), 113–137. https://doi.org/10.17335/sakaifd.345284